

IMPLEMENTASI PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SAAT PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah)

**Siti Muflihatun Martina
Sri Indarti
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

ABSTRAK

Implementasi Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini tidak hanya menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan, akan tetapi juga turut menerjang sisi perekonomian negara. UMKM sebagai sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak terparah akibat pandemi Covid-19 di Indonesia bahkan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melihat serta menganalisis sejauh mana empati perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koprasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam mendorong pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sedang terdampak Covid-19. Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan demi mendorong pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil bahwa strategi pemerintah dalam pemulihan Usaha Mikro, Kecil Menengah saat pandemi Covid-19 diharapkan dapat membantu para pelaku usaha kecil menengah dalam melanjutkan kembali usaha nya yang sempat terhenti akibat pandemi. Banyak pelaku UMKM yang harus menghentikan usahanya karena berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstimulasi UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai strategi dilakukan, salah satunya adalah bantuan modal usaha (Banpres / produktif) dan Dana Insentif Daerah. Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

kata kunci :Kebijakan, Strategi, Implementasi, UMKM

PENDAHULUAN

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada usaha proses Percepatan Penanganan Covid-19 yang termuat pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yakni tentang pembatasan aktivitas masyarakat sebagaimana upaya dari penanganan pandemi Covid-19 sudah memunculkan dampak besar untuk bidang Usaha Mikro Kecil Menengah di seluruh Indonesia.

Dampak dari pembatasan sosial berskala besar guna menangani pandemi covid-19 sangat menyusahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami krisis karena tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil menengah yang sekarang menutup usahanya sementara waktu karena sepi pembeli. (Baker & Judge, 2020).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah point penting dalam ekonomi Indonesia, dan upaya multi-sektor diperlukan agar mereka dapat bertahan dari pandemi. Jumlah UMKM yang tampaknya meningkat dalam jumlahnya meskipun dalam keadaan di terpa wabah covid-19. Ini dapat menyedihkan orang untuk percaya bahwa usaha mikro kecil menengah yang berkembang di tengah pandemi.

Namun, ini merupakan akibat dari pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau pengurangan gaji. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karyawan sering beralih pada usaha kecil. Sebagian besar dari ini melibatkan penjualan makanan dan minuman melalui platform online dan media sosial, yang bisa dengan

gampang menghadapi dampak ekonomi pandemi, sebagaimana tercantum pada PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan program pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah mengedepankan dukungan yang berbentuk program bantuan usaha untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang sekarang mengalami dampak dari pandemi covid-19. (Kompas/8/2020).

Upaya tersebut dapat terlihat dengan adanya suatu alokasi berupa anggaran khusus guna menunjang serta mendorong dan memulihkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdampak oleh pandemi.

Berdasarkan pra survey pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop UKM) Kabupaten Bengkulu Tengah maka akan dilakukan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dibuat guna melindungi serta memulihkan usaha mikro kecil menengah yang sekarang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berbagai pelatihan dan program bantuan modal usaha yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang sedang mengalami dampak dari Pandemi covid-19. Salah satunya pemerintah telah melaksanakan kebijakan melalui program yang berupa Bantuan Langsung (BLT) bagi pelaku UMKM yang terdampak covid-19.

Yakni mulai September-Desember 2020 Program (Banpres/BPUM Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro), namun pada saat peneliti melakukan pra survey di

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan yang akan di kirim ke pemerintah pusat itu di awal bulan Januari 2021.

Dan proses pencairan dana dibulan Februari 2021. Pada program ini, tiap pelaku usaha yang hendak memperoleh bantuan sejumlah Rp2,4 juta/pelaku usaha, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat serta motivasi dan memperkuat ketahanan bisnis usaha mikro kecil menengah yang sedang mengalami dampak pandemi serta dapat membantu pengusaha mikro kecil menengah guna memulihkan kembali usaha mereka.

Pendaftaran untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi usaha Kecil Menengah yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. dengan membawa berkas sebagai pelengkap untuk mendapatkan program dari pemerintah yakni Banpres/BPUM Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Penerima bantuan musti memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat, belum memiliki akses perbankan (pinjaman terhadap bank), baik itu Kredit Usaha Rakyat atau pun kredit mikro. Selain itu, saldo pada rekening pelaku UKM per bulan Juni 2020 harus dibawah Rp 2 juta. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha yang tergolong pada kategori penerima yakni mereka yang usaha produktif dengan modal tak lebih dari Rp 50 juta, tak berhubungan dengan

pihak bank atau sedang melakukan pinjaman di pihak perbankan dan dana di rekening pribadi tak boleh lebih dari Rp 2 juta.

Adapun persyaratan yang harus di lengkapi sebagai dokumen pendukung untuk mendapatkan bantuan BPUM adalah :

1. WNI (yang mendapatkan program bantuan ini merupakan warga negara Indonesia)
2. memiliki Kartu Keluarga
3. Foto lokasi Usaha
4. Nomor Telepon Yang Bisa Di Hubungi
5. Jika tempat usaha berbeda dengan lokasi tempat tinggal, harus menyertakan surat keterangan domisili dari kepala desa bersangkutan
6. Wajib membuat surat keterangan usaha (SKU) yang di validasi oleh kepala desa setempat
7. Sedang tidak mengambil pinjaman dari Bank
8. dan yang bukan berprofesi sebagai ASN, TNI, dan aparat lainnya

Para pelaku harus membawa dokumen dari syarat yang tercantum di atas. Dan melakukan pendaftaran, ke kantor dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi usaha kecil menengah setempat. nantinya pelaku usaha kecil menengah menyerahkan berkas kepada pihak pendaftaran dan para pelaku akan memperoleh pesan singkat (SMS) dari bank penyalur seperti BRI apabila mendapatkan bantuan tersebut.

Para Pelaku Usaha diminta untuk melakukan verifikasi ke bank dengan menunjukkan pesan singkat yang di terima tersebut. Namun sebelum ke bank ada baiknya para pelaku memastikan kembali benar atau tidaknya anda sebagai penerima dengan

mengakses link eformbri.co.id/bpum. Link ini merupakan link resmi dari bank BRI. Anda dapat mengaksesnya dengan mudah hanya dengan menggunakan NIK eKTP anda.

Kemudian kebijakan selanjutnya yang dilaksanakan pemerintah untuk pemulihan UMKM di kabupaten Bengkulu Tengah adalah Kegiatan Pelatihan Video Conference (Vidcon) Program Pemulihan Ekonomi pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang saat ini sedang mengalami dampak Pandemi Covid-19. (Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : 2021)

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Vidcon yang diselenggarakan di Ruang Wakil Bupati Bengkulu Tengah dan diikuti oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kepala bidang koperasi, Kepala bidang industri, serta Kepala bagian perekonomian, Barenlitbang dengan tujuan untuk mendengarkan arahan dari BPKP Provinsi Bengkulu terkait dengan strategi/kebijakan Pemerintah Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemberian bantuan modal usaha yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) tambahan 2020.

Kepada kelompok penerima bantuan usaha yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam rangka penanganan dampak serta pemulihan khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah yang saat ini mengalami dampak covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal ini berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 87 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020. Karena seperti yang dijelaskan Kabid usaha mikro kecil dan menengah jika sebelum sektor usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Bengkulu Tengah terdampak Covid 19. Dinas Perdagangan, perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu tengah pernah memberikan stimulus program Dana Insentif daerah tersebut guna untuk mengembangkan potensi para pelaku usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah Dr. Ferry Ramli, S.H.,M.H.

Nantinya penerima bantuan modal usaha ini dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara maksimal untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah khususnya pada UMKM. Penerima bantuan modal usaha disalurkan melalui 3 instansi terkait yaitu: Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi UKM

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat ketidak efektifan dan efisiensi dalam penyaluran program bantuan terhadap pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah ini tidak tepat sasaran karena banyak yang benar-benar memiliki usaha namun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan yang tidak memiliki usaha mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah lewat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil menengah sudah berperan aktif dalam melancarkan serta mensukseskan proses penyaluran

program dana bantuan tersebut, namun tetap saja terdapat kendala serta faktor penghambat.

Hal ini lah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah program implementasi pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Alasan utama peneliti melakukan objek penelitian di kabupaten Bengkulu Tengah, karena minimnya pembinaan, informasi, aksesibilitas serta pelatihan terkait pemulihan UMKM yang dilakukan Pemerintah setempat serta sumber daya manusia (keterampilan) untuk menjalankan usaha terlebih lagi menghadapi kesulitan pada aspek permodalan guna memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diadakan pada kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang dimana Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Kabupaten Pemekaran dari kabupaten Bengkulu Utara. waktu penelitian dilakuan kurang lebih 2

bulan mulai dari tanggal 5 februari 2021 s/d tanggal 30 maret 2021. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dari data primer serta sekunder. Penelitian di fokuskan pada Kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah pada masa pandemi covid-19. Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dari pengamatan, Wawancara juga dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, Penyajian data juga penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN

1. Jumlah UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, koprasi Ukm Kabupaten Bengkulu Tengah hendak dipaparkan hasil penelitian lewat wawancara langsung terhadap informan yang sudah dipilih informan yang terpilih yaitu:

Jumlah UMKM yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dibawah ini merupakan tabel yang memaparkan total UMKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah

Tabel 1

Jumlah UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah(unit)
1.	UMKM jenis kuliner	2.870
2.	UMKM jenis perdagangan	2.170
3.	UMKM jenis pertambangan	31
4.	UMKM jenis industry	56
5.	UMKM jenis pertanian	1.278
6.	UMKM jenis jasa	886

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Implementasi Pemulihan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kemenkop UMKM untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah juga telah mempersiapkan program-program kebijakan melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM demi menunjang pemulihan pada sektor UMKM di Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terkena dampak covid-19 maka dibutuhkan upaya-upaya strategi untuk perbaikan ekonomi ini terutama pada sektor UMKM.

Secara umum implementasi pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan prosedur dan terlaksana secara baik. Tetapi demikian pelaksanaan implementasi UMKM masih dijumpai kendala. Hal itu bisa diketahui melalui sejumlah kejadian yang peneliti jumpai sepanjang mengadakan penelitian.

a. Proses Pengusulan Penerima Bantuan Modal Usaha Pemulihan UMKM Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Para pelaksana dinas Perdagangan, Perdagangan Koperasi dan usaha Kecil Menengah telah berperan aktif dalam pengusulan penerima bantuan modal usaha serta pembantuan dalam pengumpulan berkas dan persyaratan penerima bantuan modal usaha Banpres/ Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan UKM

“ dalam pengusulan nama calon penerima bantuan modal usaha kami selaku pelaksana telah melaksanakan

dan berperan dalam hal pengurusan berkas dan persyaratan lainnya namun terdapat kendala karena dampak Covid-19 menyebabkan peningkatan 2x lipat jumlah UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti yang kami usulkan jumlah UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah yakni 7975 mengalami peningkatan dari sebelum adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan pihak kami berasumsi bahwa yang tidak mempunyai Usaha juga ikut mendaftar bantuan usaha produktif ini. Menyebabkan pelaku UMKM yg benar-benar mempunyai usaha tidak mendapat kan bantuan modal usaha dan yang tidak mempunyai usaha malahan mendapatkan bantuan modal”.(Hasil wawancara, Maret 2021)

Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan :

“untuk melakukan survey sebagai pembuktian apakah nama yang di usulkan tersebut benar-benar mempunyai usaha atau tidak pihak kami belum bias melakukan survey dikarenakan terbatasnya modal untuk melakukan kegiatan tersebut.” (Hasil wawancara, Maret 2021)

Berlandaskan hasil wawancara tersebut bisa disampaikan bahwa Implementasi Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan sesuai dengan prosedur melalui dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM dengan kegiatan daftar pengusulan nama penerima Bantuan yang selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan Pemulihan UMKM

Berkaitan dengan pelaksanaan pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pelaksanaan Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terkena dampak Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM.

Pelaksanaan program pemulihan UMKM ini berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- 2) PP Nomor Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN.
- 3) Pada fase realisasi seluruh program ini diawasi (diaudit) oleh BPK RI serta Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Republik Indonesia (BPKP RI) dari bulan September 2020.

Hasil pelaksanaan program bantuan modal usaha untuk pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah, di antaranya bantuan modal usaha Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, Dana Insentif Daerah, Pelatihan Vidcon mengenai Pemulihan UMKM. Bahwa semua kegiatan tersebut telah di laksanakan dan di selesaikan secara baik. Hal tersebut senadaterhadap pernyataan dari Kasubag Umum & Kepegawaian.“
Novi Herianti. S.E. Nip sebagai berikut

“menurut pengamatan kami semua kegiatan yang berkaitan

dengan Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur terselesaikan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala” (Hasil wawancara Maret 2021)

Sedangkan Subbag Perencanaan Dedi Irawan.S.E.,M.A.k juga memberikan pernyataan pendukung dari pernyataan Kasubag Umum & Kepegawaian di atas sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemulihan UMKM melalui bantuan modal usaha dari Pemerintah Pusat melalui kami Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koprasi UKM telah terselesaikan semua karena pihak kami hanya mengusulkan nama penerima bantuan UMKM, yang selanjutnya dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Pusat”.(Hasil wawancara Maret 2021)

Mempertimbangan kesimpulan pada proses Implementasi Pemulihan UMKM di atas maka di tarik kesimpulan jika proses Implementasi UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah sudahdilaksanakansecara baik dan sesuai prosuder dari pemerintah pusat meskipun terdapat beberapa kendala.

Hal ini dapat di lihat dengan adanya pengusulan nama pelaku UMKM dalam bantuan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, ada nya penyelesaian kegiatan bantuan modal usaha meskipun baru tahap pertama dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah akan tetap mengusulkan bantuan tahap ke 2.

b. Pencapaian Tujuan Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan program bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan Pemulihan UMKM melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Terdapat sejumlah pernyataan yang serupa antara informan satu terhadap informan lainnya. Merujuk pada hasil wawancara dengan Sri Heriyani, S.H.Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berikut penuturannya :

“kondisi UMKM sekarang sangat buruk sebab dampak dari pandemic Covid-19 perubahan yang sangat signifikan dari sebelum adanya Covid-19 dengan masa pandemic Covid-19 saat ini sangat merugikan para pelaku UMKM karena beberapa factor seperti turunnya pendapatan (omset), kesulitan bahan baku terlebih lagi kesulitan dalam hal permodalan. Dengan terdapatnya kebijakan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, kami mengharapkan agar bantuan modal usaha tersebut dapat membantu permasalahan yang dialami para pelaku UMKM serta dapat membangkitkan dan pemulihan UMKM di Kabupaten

Bengkulu Tengah. (Wawancara, Maret 2021)

Demikian juga pelaksana program pemulihan UMKM memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“ program bantuan modal usaha ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk pemulihan dan membangkitkan usaha mereka yang sempat jatuh akibat adanya pandemic Covid-19 ini. Dan semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. “

Berlandaskan hasil wawancara yang dijalankan peneliti terhadap para informan tersebut bisadipahami jika tujuan dari program pemulihan UMKM pada masa pandemi tersebut, yaitu membangkitkan dan memulihkan sector UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dapat dicapai.

2) Kemampuan lembaga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pemulihan UMKM di masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Agar realisasi program bantuan modal usaha dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat waktu. Sedangkan dalam proses penyaluran modal usaha untuk implementasi pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah juga ikut melibatkan 3 Dinas terkait yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang).

Merujuk pada pengamatan peneliti bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pemulihan UMKM karena

kurangnya efektifitas dari pihak pelaksana pemulihan UMKM terkait dengan program yang dilaksanakan yang menyebabkan para pelaku UMKM yang tidak mempunyai usaha mala mendapatkan usaha dan yang mempunyai usaha tidak mendapatkan program bantuan tersebut

Berdasarkan uraian dari implementasi pemulihan UMKM di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan dari Pemerintah dalam pemulihan UMKM telah diimplementasikan berdasarkan peraturan yang berlaku serta berdasarkan prosedur, tetapi demikian pelaksanaannya belum bisa meraih tujuan kebijakan dengan maksimal.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pemulihan Umkm di kabupaten. Bengkulu Tengah

Faktor penghambat utama pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari masalah pemasaran yang menjadi hambatan. Selain itu faktor-faktor penghambat dalam permodalan dan produksi/teknologi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan pada aspek pemasaran dalam menjangkau konsumen. Serta skill tenaga kerja, lokasi tempat usaha dan bahan baku.

- 1) Terbatasnya modal serta akses dari sumber serta lembaga keuangan. Keuangan inklusif butuh diprogramkan pada program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal musti dibarengi terhadap pembinaan sistem manajemen.
- 2) Masih rendah nya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial dari pelaku UMKM

butuh di *upgrade*. Begitu juga sistem kaderisasi musti diciptakan. Banyak dijumpai UMKM sekedar *oneman show*, alhasil dibutuhkan tim kuat yang bisa meneruskan UMKM dari penggagasnya.

- 3) Kapasitas pemasaran yang terbatas, walaupun media *online* sudah merajalela, tetapi media tersebut belum digunakan dengan maksimal oleh UMKM.
- 4) Akses informasi usaharendah Belum tercipta kerjasamayang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM, usahabesar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemitraan butuh diciptakan supaya bisa menciptakan sistem yang saling menunjang ada banyak persoalan pada usaha pemulihan UMKM, sejumlah permasalahan itu terjadi dari sukarnya UMKM untuk menjangkau sejumlah sumber-sumber ekonomi, disisi lain sedikit golongan masyarakat yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan UMKM.

PEMBAHASAN

1. Analisis dan Implementasi Pemulihan UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam model Implementasi Korten mengungkapkan jika sebuah program bisa berhasil dijalankan bila ada kesesuaian dari 3 unsur implementasi program. Berikut Model Implementasi David C. Korten yang berkaitan dengan Implementasi Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah :

kesesuaian antara program terhadap pemanfaat, yakni kesesuaian

diantara sesuatu yang diberikan oleh program terhadap sesuatu yang diperlukan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

- a. Kesesuaian antara program terhadap pemanfaat, yakni kesesuaian antara sesuatu yang disediakan oleh program terhadap sesuatu yang diperlukan kelompok sasaran (pemanfaat). Pemerintah Disperindagkop Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan program yang diperlukan oleh para pelaku umkm yang terdampak Covid-19 yakni Program Bantual Modal Usaha BANPRES/BPUM, dan Dana Insentif Daerah (DID). yang diharapkan dapat membantu permasalahan permodalan yang dialami para pelaku umkm di kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Kesesuaian antara program terhadap organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara tugas yang ditentukan oleh program terhadap kapasitas organisasi pelaksana. Secara prosedur Pemerintah Dinas Perdagangan, perindustrian UKM Kabupaten Bengkulu Tengah telah berperan sangat baik dalam hal pendataan, pengusulan bantuan modal usaha Banpres produktif dan dana insentif daerah karena pihak Disdagperinkop hanya mengusulkan dan menginput data nama-nama para pelaku usaha yang diusulkan selebihnya pihak pemerintah pusat yang akan memproses pembagian modal usaha Banpres Produktif dan Dana Insentif Daerah
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat terhadap lembaga pelaksana, yakni kesesuaian antara

ketentuan yang ditetapkan lembaga guna bisamendapat output program terhadap sesuatu yang bisa dijalankan oleh kelompok target program, yang mana output (hasil) dari program tersebut bermanfaat bagi pelaku usaha (pemanfaat) dalam memulihkan serta membangkitkan kembali usaha mereka yang sempat terpuruk akibat pandemic covid-19

Berlandaskan pola yang dikembangkan Korten, bisa dipahami bahwa bila tidak ada kesesuaian antara 3 unsur pelaksanaan kebijakan, kinerja program tidak bisa berhasil selaras terhadap sesuatu yang dikehendaki. Bila output program tidak selaras terhadap kebutuhan kelompok target sudah pasti outputnya tidak bisadigunakan.

Program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang telah dilaksanakan pihak pemerintah Disdagperinkop yang mana Tujuan dari program ini adalah untuk pemulihan umkm di kabupaten Bengkulu Tengah. Sasaran program ini adalah agar umkm di kabupaten Bengkulu Tengah dapat memulihkan serta meningkatkan penataan kelembagaan, permodalan, dan pemasaran bagi UMKM yang sedang terdampak pandemic Covid-19.

Sehingga dapat mewujudkan perkembangan UMKM yang signifikan bahkan seperti sebelum terkena dampak covid-19. Guna mencapai sasaran itu kemudian ditentukan program dengan kegiatan penyelenggaraan modal usaha bagi para pelaku umkm. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut "Wak marni" (usaha ikan lele) mengatakan jika :

“dengan adanya bantuan modal usaha dari pemerintah pusat melalui dinas Perdagangan, perindustrian Koprasi UKM ini saya dapat meningkatkan kembali usaha saya yang sebelumnya saya mengalami keterbatasan dalam modal akibat penurunan hasil penjualan sekarang dapat menstabilkan kembali usaha saya”(wawancara Maret 2021)

2. Analisis dan Pembahasan Strategi Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah

Dampak pandemic Covid.19 yang mengakibatkan terpuruknya sector UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan kebijakan, aparaturr dan tata kelola program bantuan modal usaha dalam upaya Pemulihan UMKM yang terdampak.

Adapun Strategi Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Yaitu:

Strategi dari Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi UMKM. dalam upaya pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akibat situasi pandemi Covid-19. Adapun strategi yang telah dilaksanakan yakni program Bantuan modal usaha di antaranya :

- a. Dana Insentif Daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di salurkan kepada kelompok penerima bantuan usaha kab. Bengkulu tengah. Tambahan DID ini termuat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Salah satu implementasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pemulihan UMKM yakni program bantuan modal usaha diberikan untuk pelaku Usaha Miirko Kecil dan Menengah (UMKM) terkena dampak Covid-19 yang Bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) serta UKM Kabupaten Bengkulu Tengah. Kepala Bidang Koprasi dan UMKM “ Mimi Novianti S.Pt.” menyampaikan bahwa pihak nya telah menyalurkan bantuan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) kepada pelaku usaha UMKM masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Tambahan tahun anggaran 2020 dari pemerintah pusat mencapai Rp13,4 miliar.

Dana tersebut ditujukan guna untuk pemulihan ekonomi daerah, (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Benteng Nirzawan, Senin). Lebih spesifik,dana tersebut digunakan guna menunjangIndustri Kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pasar tradisional serta penanganan COVID-19 di Bengkulu Tengah dalam aspek kesehatan maupun sosial.

serta juga pihaknya telah melaksanakan rapat bersama Sekretaris Daerah dan beberapa kepala OPD terkait pengggunaan anggaran DID tersebut yang berkaitan dengan mendorong pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Rapat membahas kriteria yang berhak mendapat kan bantuan modal dalam rencana untuk membantu perekonomian akibat dampak COVID-19 di wilayah Bengkulu Tengah. Seperti para kelompok tani, dan

kelompok usaha lainnya yang menerima bantuan modal.

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan modal usaha yakni masyarakat yang masih produktif. Antara lain, kelompok usaha anyaman bambu, budidaya ikan serta pembuat anyaman dari limbah lidi sawit di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan. Rata-rata, setiap anggota menerimasejumlah Rp 2 juta per orang dengan harapan, dapat membikin anggota kelompok tambah semangat untuk menekuni usaha yang dijalankan “jelas mimi noviarti” Kabid Koperasi & UMKM.

“Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Dan UMKM Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu Mimi Novrita Mengatakan “Bantuan yang berasal dari DID ini sudah disalurkan kepada penerimanya beberapa waktu lalu dengan total bantuan sebesar Rp 1 miliar.

Penerima bantuan modal usaha yang telah disalurkan melalui 3 dinas terkait yaitu:

- 1) Dinas Pertanian sebanyak 78 kelompok,
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 53 kelompok,
- 3) Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi :
 - a) Usaha Kecil Menengah sebanyak 100 kelompok dan 100 kelompok Industri Kecil Menengah ,
 - b) Kelompok Masyarakat Produktif sebanyak 27 kelompok
 - c) Koperasi sebanyak 12 kelompok pembiayaan dibebankan pada biaya Dokumen Pelaksana Anggaran pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020.

Secara rinci bantuan ini telah diberikan kepada UKM sebesar Rp 200 juta dengan rincian 100 kelompok, satu orang menerima Rp 2 juta. Kemudian untuk IKM sebesar Rp 200 juta untuk 100 kelompok, jadi untuk satu orang menerima sebesar Rp 2 juta.

Jelas Mimi Novrita ditempat” sejumlah 27 golongan usaha masyarakat telah menerima bantuan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari Pemerintah Pusat, bantuan yang diberikan berbeda-beda, karena tergantung jumlah anggotanya. Untuk kelompok usaha produktif ini paling rendah akan menerima Rp 5 Juta satu kelompok dan yang paling tinggi menerima Rp 25 juta satu kelompok.

Selanjutnya untuk koperasi sebesar Rp 120 juta untuk 12 kelompok, sehingga untuk satu kelompok koperasi menerima Rp 10 juta, Penyerahan bantuan modal usaha yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) tambahan 2020. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H. Dimana tujuan dari Program bantuan modal usaha yang bertujuan untuk pemulihan UMKM yang terdampak akibat Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan harapan dapat mendorong pemulihan Ekonomi Daerah, Industri Kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, pasar tradisional juga bentuk pemulihan dampak Covid-19.

Modal usaha ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan di pergunakan dengan sebaik mungkin oleh pelaku usaha. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap penerima modal usaha dari Dana Insentif Daerah tersebut ibu “ Tri

Murti S.I.Kom” yang tergabung dalam kelompok usaha produktif kopi menyebutkan

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan modal usaha yang berasal dari Dana Insentif daerah tahun 2020 yang berjumlah 2 juta insyaallah dengan adanya kebijakan dari pemerinth Kabupaten Bengkulu Tengah dapat memulihkan serta membangkitkan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan dengan modal ini saya dan kelompok usaha lainnya dapat membangkitkan usaha kami yang merosot akibat dampak pandemic Covid-19.”(Hasil wawancara Maret 2021)

- b. Strategi selanjutnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah dana BPUM/BANPRES dari pemerintah pusat untuk pelaku UMKM. Bantuan modal dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp 2.400.000 per UKM, melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Target sasaran Belum Terakses Perbankan, atau Nasabah Perbankan yang mempunyai tabung di bawah Rp 2 juta, serta tidak memiliki kredit di bank.

Dijelaskan Kepala Bidang Koprasi dan UMKM Bengkulu Tengah Mimi Novianti saat ditemui di ruangannya menjelaskan bahwa,

“pihaknya telah mengusulkan sebanyak 7.890 berkas setiap kecamatan di kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk data penerima bantuan BPUM sendiri beliau menjelaskan tidak mengetahui pasti data dan nama-nama penerima bantuan serta di kecamatan mana

saja yang mendapatkan bantuan tersebut sebab bantuan tersebut diberikan langsung kepada pelaku UMKM melalui pemberitahuan SMS dari Bank BRI langsung”.(Hasil wawancara Maret 2021)

Jumlah pelaku Umkm yang mendapat kan bantuan modal BANPRES/BPUM sekitar kurang lebih berjumlah 2.487 Pelaku usaha yang tersebar di 11 kecamatan/desa kabupaten Bengkulu Tengah “jelas ibu mimi” saat di wawancarai di ruangannya. Dia pun menjelaskan tidak mengetahui secara detil nama-nama serta dari kecamatan apa saja yang mendapatkan bantuan modal BANPRES tersebut karena bantuan langsung di berikan kepada pelaku dan pemberituannya melalui SMS, sehingga pihak disperindagkop tidak memegang data penerima bantuan tersebut karena memang dari pusat tidak diberikan.

Sebagaimana pernyataan Darsi ketua UKM Sidomulyo mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang telah memberikan bantuan modal usaha ini, tentu sangat membantu sekali

“Alhamdulillah sangat senang dan berterimakasih bantuan ini sangat membantu UKM dalam terus menjalankan usaha kami, bantuan ini tentu membantu pendanaan produksi usaha yang kami jalankan”

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemulihan UMKM yang terkena pandemi covid-19 sekarang pelaksana dari program tersebut di atas telah berperan aktif dalam memberikan arahan terhadap pengusaha untuk

mendapatkan bantuan modal usaha tersebut, salah satu nya dalam proses pengusulan nama serta pemberian instruksi untuk pengumpulan persyaratan yang harus di lengkapi.

Dalam hal ini pelaksana organisasi program bantuan modal usaha untuk pemulihan usaha mikro kecil menengah yang terdampak telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan cukup baik, dan lancar. Selanjutnya pihak pelaksana mengirimkan data yang telah di input kepada pemerintah pusat untuk seleksi selanjutnya siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan , akan di kabari langsung melalui pesan singkat.

3. Strategi Tambahan Yang Disarankan Untuk UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah

- a. Perlunya peningkatan inovasi, kreasi dan pelatihan aparatur dalam pemulihan UMKM Bagi pelaku UMKM Inovasi bisnis pada kondisi pandemi, bagaimanapun perlu memperhatikan 2 komponen penting yakni: sumber daya keuangan serta sistem pasar. Dari perspektif keuangan, pandemi secara umum sudah merugikan sumber daya UMKM, sejalan terhadap merosotnya pemasukan mereka. Sumber daya keuangan konsumen akan lebih banyak dipakai guna bertahan hidup. Itu maknanya, inovasi yang memerlukan sumber daya keuangan yang besar, misal pembuatan produk baru idealnyadihindari.

UMKM butuh lebih fokus dalam inovasi dengan ongkos yang murah, misal inovasi proses serta posisi. Pasar, di sisi lain ditandai dari menurunnya daya

beli sertadibarengi terhadap pergeseran preferensi pembeli.

Pembeli lebih suka membeli untuk barang kebutuhan yang penting serta *urgent*, daripada barang kebutuhan yang tidak begitu penting serta *urgent*. Karena itu, inovasi yang dipilih juga tidak hanya senada terhadap sumberdaya, namun pula aksesibilitas pasar.

Bagi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian Koprasi UKM juga perlu adanya Inovasi berbasis Internet agar lebih mudah para pelaku UMKM mengakses serta mendapatkan informasi terkait pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah dan tentu nya juga harus di dukung oleh sarana serta prasarana yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Bengkulu tengah agar dapat dengan mudah dalam meng akses internet.

Kreasi dalam hal produk seperti makanan dan minuman , turutilah permintaan konsumen jika konsumen di daerah tersebut lebih menyukai makanan pedas atau manis hendak lah para pelaku usaha menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan keinginan konsumen dengan melakukan survey terlebih dahulu

Pelatihan bagi aparatur Dinas Koperasi dan UKM Pemulihan UMKM agar meningkatkan sumber daya yang berkualitasakan tetapi kemungkinan ini menjadi kendala untuk dilaksanakan mengingat minimnya modal atau terdapat kendala lain sehingga tidak dapat diterapkan di setiap kecamatan. Seperti yang di sampaikan oleh ibu mimi selaku

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM serta motivasi untuk dapat bangkit dan kembali memulai usahanya setelah. Terkena dampak Covid-19.

Selain itu, pelatihan tersebut pun dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial untuk UMKM, alhasil tercipta kinerja yang maksimal serta tumbuh berkembang jadi UMKM yang sehat, kuat, serta mandiri selaku pengusaha pada perekonomian masyarakat.

- b. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam penanganan pemulihan UMKM berupa aplikasi atau suatu inovasi yang dapat mempermudah dalam pemulihan umkm
- c. Perlunya sinkronisasi data dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat seperti yang peneliti lihat dari keterangan narasumber “ibu mimi” bahwa data yang mereka kirim ke pusat itu berbeda-beda dengan keterangan dinas-dinas yang lain sebab dari pernyataan ibu mimi bahwa pihaknya hanya mengusulkan nama-nama (menginput data) kemudian di kirim ke pemerintah pusat selebihnya beliau mengatakan tidak mengetahui detail penerimaan bantuan Banpres produktif dan dana insentif daerah tersebut sebab program bantuan tersebut langsung di kirim kan melalui rekening masing-masing pelaku usaha.

4. Strategi Untuk Pelaku UMKMN

- a. Aktivitas UMKM yang setiap harinya bersinggung langsung dengan konsumen untuk menawarkan produknya menjadi berkurang karena adanya peraturan PSBB oleh Kemenkes sehingga masyarakat di haruskan untuk tetap berada di dalam rumah untuk mematuhi protokol kesehatan.
- b. Pergeseran pola konsumsi masyarakat menyebabkan turunnya penjualan, saat ini masyarakat lebih memilih untuk memrioritaskan kebutuhan pada makanan dan kebutuhan sehari-hari serta alat kesehatan daripada membeli kebutuhan yang dinilai kurang penting. Jadi pelaku UMKM harus bisa memenuhi permintaan konsumen.
- c. Pelaku UMKM untuk bertahan dimasa ini adalah melakukan adaptasi bisnis dan membuat inovasi produk sehingga bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar. Pada situasi pandemi covid-19 para pelaku UMKM harus berinovasi dalam hal memproduksi barang dagangannya contoh nya seperti memproduksi kebutuhan sehari-hari yang di perlukan oleh masyarakat.
- d. Penguatan digitalisasi yaitu dengan penjualan secara online Pemanfaatan Internet dan Teknologi Informasi (TI) jadi suatu cara untuk pelaku bisnis guna menjaga juga menaikkan pemasukan. Pembatasan sosial menyebabkan metode pemasaran konvensional jadi terbatas. Jalur online jadi alternatif yang cukup bagus. Metode promosinya pun bervariasi dari menciptakan gambar yang menarik atau menghadirkan informasi produk menggunakan

sajian artikel guna membuat pelanggan tambah memahami dengan rinci produk yang ditawarkan.

- e. Pengurangan jumlah tenaga kerja dalam menghadapi pandemi covid-19 para pelaku usaha harus mengurangi jumlah karyawan agar menghemat pengeluaran
- f. Menggunakan Pemasaran yang Rendah Biaya Ketika pandemi Covid-19 melanda, umumnya bisnis langsung menurunkan kegiatan pemasaran sebab biaya yang relatif banyak. Padahal, kunci guna meneruskan bisnis bukan menurunkan kegiatan pemasaran, namun mengganti terhadap biaya yang cukup ringan. Pemasaran contohnya *blogging*, postingan di medsos serta memulai pemasaran via online yang lain benar-benar bisa menurunkan biaya pemasaran bisnis UMKM.

KESIMPULAN

1. Implementasi Pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah terlaksana secara baik serta selaras terhadap prosedur meskipun belum terpenuhi secara optimal. Secara umum implementasi pemulihan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan implementasi UMKM masih terdapat kendala.
2. Strategi dari Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM. dalam upaya pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akibat pandemi Covid-19.

Hal ini dapat dilihat dengan angka penerima bantuan UMKM yang mencapai 7654 pelaku umkm dan yang menerima bantuan Banpres produktif hanya berjumlah 2844 yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Meskipun terdapat banyak para pelaku usaha yang berpura-pura memiliki usaha padahal tidak memiliki usaha. Serta jumlah penerima Dana Insentif Daerah yang berjumlah 27 kelompok, 100 anggota IKM dan 100 anggota UKM serta 12 kelompok Koprasi di sini sudah terlihat bahwa program bantuan modal usaha ini telah terselesaikan dengan merata meskipun terdapat beberapa kendala/factor penghambat.

Dan pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mengadakan Video Conference yang di laksanakan di ruang terbuka kantor Bupati

3. Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemulihan UMKM di kabupaten Bengkulu Tengah diantaranya
 - a. Terbatasnya modal serta akses dari sumber serta instansi keuangan. Keuangan inklusif butuh dimasukkan pada program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal butuh dibarengi terhadap pembinaan sistem manajemen.
 - b. Masih rendah nya kualitas sumber daya pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM butuh di *upgrade*. Begitu juga sistem kaderisasi butuh dibangun. Banyak ditemukan UMKM

hanya *one man show*, alhasil dibutuhkan tim solid yang bisa mewarisi UMKM dari pendirinya.

- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Walaupun media *online* sudah populer, tetapi media tersebut belum digunakan dengan maksimal oleh UMKM.
- d. Akses informasi usaha rendah. Belum tercipta kerjasama yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, usaha besar, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerjasama butuh diciptakan supaya bisa menciptakan sistem yang saling menunjang. Tidak sedikit masalah pada upaya pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah, sejumlah permasalahan itu timbul disebabkan oleh sulitnya UMKM untuk dalam hal modal perekonomian, di sisi lain, tidak banyak kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Maka dari itu poin-poin di atas perlu diperhatikan oleh Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi UKM di Kab Bengkulu Tengah agar kedepannya dapat meningkatkan serta mengembangkan UMKM dalam pemulihan akibat pandemic Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. (2015). Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM. Retrieved from

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-dan-peningkatan-peran-ekonomi-umkm/>

Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan*

ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal.31.

Burhan, F. (2020). *Bisnis Anjlok Akibat Pandemi Corona, UMKM Bisa Ubah*

Strategi Usaha. Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/2020/04/15/bisnis-anjlok-akibat-pandemi-corona-umkm-bisa-ubah-strategi-usaha>

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

Fenita, (2017). *Implementasi Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*.

Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theor and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

Heineman, Robert A *et al.* 1997. *The World of Policy Analyst*, Chatham House Publishers, Inc. Chatham NY.

Herlansyah, Praditya (2016) *Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* <https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/diaksespada12November,pukul19.15WIB>

<https://www.scribd.com/doc/314834468/Pengertian-UMKM>

- Kristian Aknolt, (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Rahayu, S.L 2005, Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional.
- Ripley, Rendal B.and GraceA. Franklin.1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sutopo, 2000 Kebijakan Publik dan Implementasi, Jakarta, LAN Dye, T.R, 1978
- Understanding Public Policy, New Jersey : Prentice Hall, Inc
- Tulus T.H.Tambunan, *UMKM diIndonesia*, (Bogor:GhaliaIndonesia,2009),hal.16
- Tulus Tambunan,*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia:Isu-Isu Penting*, (Jakarta:LP3ES, 2012),hal.11
- Winarni, S. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006